

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEASISTENAN UTAMA MANAJEMEN PENCEGAHAN MALADMINISTRASI
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Herru Kriswahyu

Jabatan : Kepala Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mokhammad Najih

Jabatan : Ketua Ombudsman Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2026 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Mokhammad Najih

KEPALA KEASISTENAN UTAMA
MANAJEMEN PENCEGAHAN
MALADMINISTRASI,

Herru Kriswahyu

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEASISTENAN UTAMA MANAJEMEN PENCEGAHAN MALADMINISTRASI
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik	Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan	1 Saran
	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi	1 Kelompok masyarakat
	Jumlah penyelenggara pelayanan publik bagi kelompok marjinal dan bagi masyarakat di daerah terluar, terdepan, tertinggal (3T) yang dilakukan pendampingan	1 Lembaga
	Jumlah jenis data pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	1 Data
	Jumlah kementerian/lembaga yang dinilai atas opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	85 Kementerian/ Lembaga

KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN
Pencegahan Maladministrasi	
Output 1: Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik yang Bersifat Tematik dan Selektif Khusus Program Prioritas Presiden	Rp 5.700.000
Output 2: Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi di Perwakilan	Rp 6.660.000
Output 3: Penyelenggara Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal dan bagi Masyarakat di Daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) yang Dilakukan Pendampingan	Rp 5.700.000
Output 4: Manajemen Pengetahuan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Rp 5.700.000
Output 5: Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga	Rp 1.249.480.000
Total	Rp 1.273.240.000

Jakarta, Januari 2026

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA KEASISTENAN UTAMA
MANAJEMEN PENCEGAHAN
MALADMINISTRASI,



Mokhammad Najih



Herru Kriswahyu



DESKRIPSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEASISTENAN UTAMA MANAJEMEN PENCEGAHAN MALADMINISTRASI

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik	Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan	1 Saran	Merupakan keluaran atas kegiatan kajian Ombudsman berupa saran perbaikan kepada penyelenggara pelayanan publik.	Laporan Hasil Analisis	Dihitung berdasarkan jumlah saran perbaikan terhadap kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik
	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi	1 Kelompok masyarakat	Merupakan keluaran atas kegiatan kelompok masyarakat peduli maladministrasi di perwakilan. Keluaran dari kegiatan ini adalah kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi.	Data Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi	Dihitung berdasarkan jumlah kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi dari kegiatan kelompok masyarakat peduli maladministrasi.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
	Jumlah penyelenggara pelayanan publik bagi kelompok marjinal dan bagi masyarakat di daerah terluar, terdepan, tertinggal (3T) yang dilakukan pendampingan	1 Lembaga	Merupakan keluaran atas kegiatan pendampingan penyelenggara pelayanan publik bagi kelompok marjinal dan bagi masyarakat di daerah terluar, terdepan, tertinggal (3T).	Laporan kegiatan pendampingan penyelenggara pelayanan publik bagi kelompok marjinal dan bagi masyarakat di daerah terluar, terdepan, tertinggal (3T)	Dihitung berdasarkan jumlah instansi penyelenggara pelayanan publik bagi kelompok marjinal dan bagi masyarakat di daerah 3T yang didampingi
	Jumlah jenis data pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	1 Data	Merupakan keluaran atas kegiatan Manajemen Pengetahuan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.	Data pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	Dihitung berdasarkan jumlah jenis data pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang dihasilkan.
	Jumlah kementerian/ lembaga yang dinilai atas opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	85 Kementerian/ Lembaga	Merupakan keluaran atas kegiatan penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian/Lembaga yang	Laporan Hasil Penilaian Opini	Dihitung dengan menjumlah seluruh Kementerian/Lembaga yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik $\sum KLOP = KLOP_1 + KLOP_2 + \dots + KLOP_n$

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
			menjadi lokus penilaian opini.		$\Sigma KLOP$: Jumlah Kementerian/ Lembaga yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik KLOP : Kementerian/ Lembaga yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik